

**PENGARUH TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN
TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUWU**

SKRIPSI

**TRI ASTUTI M
10573 05350 15**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN
TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUWU**

SKRIPSI

Oleh
TRI ASTUTI M
NIM 105730535015

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“So Let No This Present Life Decevie You “

Persembahan

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang senang tiasa membimbingku dan mendoakan disetiap perjalanan hidupku.
2. Teman-teman kelas AK 15 E yang selalu memberikan motivasi, semangat dan bantuan.
3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu dan memberikan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu"

Nama Mahasiswa : Tri Astuti M
No. Stambuk / NIM : 105730535015
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Hj. Naidah, SE, M.Si
NIDN. 0010026403

Pembimbing II,

Linda Arisanty Razak, SE., M.Si. Ak. CA
NIDN. 0920067702

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Ismail Badollahi., SE., M.Si., Ak., CA., CSP.
NBM. 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : **Tri Astuti M, NIM 10573 05350 15**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 145 / Tahun 1440 H / 2019 M, Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H

31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Andi Rustam, SE.,MM.,AK.,CA,CPA (.....)
 2. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si., Ak.,CA (.....)
 3. Abd Salam HB, S.E., M.Si., Ak,CA (.....)
 4. Samsul Rizal, S.E., MM (.....)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Astuti M
Stambuk : 105730535015
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu"

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Tri Astuti M

Tri Astuti M

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi,



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Dr. Ismail Badollahi, SE. M.Si, Ak. CA. CSP
NBM: 107 3428

ABSTRAK

Tri Astuti M, Tahun 2019. Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Hj. Naidah, dan Pembimbing II Linda Arisanty Razak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. Desain penelitian yang digunakan adalah eksplanatori. Pengambilan sampel menggunakan kuesioner terhadap 44 responden. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, regresi linear sederhana, uji t dengan menggunakan program SPSS versi 20.0.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa variabel transparansi penggunaan anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyajian laporan keuangan daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

Kata Kunci: *Transparansi Penggunaan Anggaran, Laporan Keuangan Daerah*



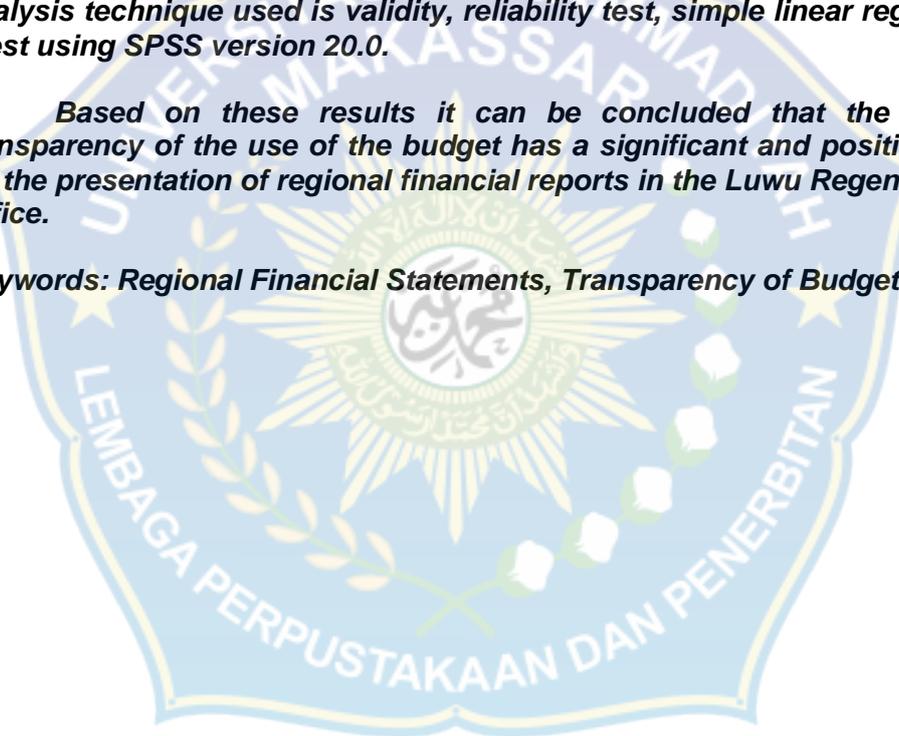
ABSTRACT

Tri Astuti M, 2019. The Effect of Transparency in Budgeting on the Presentation of Regional Financial Statements in the Luwu Regency Trade Office, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by supervisor I Hj. Naidah, and Second Counselor Linda Arisanty Razak

This study aims to assess the effect of transparency of budget use on the presentation of regional financial reports in the Luwu Regency Trade Office. The research design used is explanatory. Sampling using a questionnaire against 44 respondents. The purpose of this study is to determine the Effect of Budget Use Transparency on the Presentation of Regional Financial Statements in the Luwu Regency Trade Office. The data analysis technique used is validity, reliability test, simple linear regression, t test using SPSS version 20.0.

Based on these results it can be concluded that the variable transparency of the use of the budget has a significant and positive effect on the presentation of regional financial reports in the Luwu Regency Trade Office.

Keywords: Regional Financial Statements, Transparency of Budget Use.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Rahmat Allah SWT, Segala Puji dan Syukur Penulis Haturkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan anugrah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan guna memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa Proposal Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima masukan, bimbingan, dan dukungan dari setiap pihak baik bantuan dari segi moril maupun dari segi materil kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tersayang atas doa dan nasehat-nasehat serta dukungan yang tiada henti diberikan kepada Ananda.
2. Bapak **Prof. Dr. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Ismail Rasulong, SE.,MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak **Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar

5. Ibu **Hj. Naidah, SE, M. Si** selaku Pembimbing I dan ibu **Linda Arisanty Razak, SE., M. Si. Ak. CA** selaku Pembimbing II terima kasih atas bimbingan dan nasehat-nasehatnya selama dalam pemeriksaan skripsi ini
6. Saudara-saudara saya Yakni Dr. Yusdar Mustamin. M.Si dan Winda Rezky Mustamin, S.P.
7. Segenap Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Khususnya dosen-dosen Jurusan Akuntansi, yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama dalam proses perkuliahan
8. Buat seluruh teman-teman kelas AK 15. E dan seluruh mahasiswa angkatan 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan tak pernah berhenti mendoakan agar diberi kemudahan dan keberhasilan kepada penulis.
10. Para Pegawai dan Staff Dinas Perdagangan Kabupaten luwu yang selama ini membantu saya dalam pengambilan sampel dalam skripsi ini.
11. Teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan motivasi dan dukungannya selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT menerima dan membalas amal perbuatan baik dari semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum begitu sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dalam menyempurnakan dan

memperbaiki skripsi ini untuk bertujuan kedepan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Aamiin...

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat

Makassar, Agustus 2019

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Laporan Keuangan Daerah	7
1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah	7
2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8
3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
4. Kualitas Laporan Keuangan Daerah	12
B. TRANSPARANSI.....	15
1. Pengertian Transparansi	15

2. Manfaat Transparansi.....	15
3. Tujuan Transparansi.....	15
4. Asas-Asas Transparansi	15
C. ANGGARAN	16
1. Pengertian Anggaran.....	16
2. Tujuan-Tujuan Anggaran.....	16
3. Manfaat Anggaran	17
4. Fungsi Anggaran	17
5. Kelemahahan Anggaran.....	18
6. Langkah-langkah Menyusun Anggaran	19
D. Penelitian Terdahulu.....	20
E. Kerangka Konsep.....	26
F. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Dan Waktu	27
C. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran	27
D. Populasi Dan Sampel	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
1. Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi.....	33
2. Visi Dan Misi Organisasi	34
3. Struktur Organisasi	35

4. Deskripsi Pekerjaan	35
B. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden.....	40
1. Jenis Kelamin	41
2. Umur	41
3. Pendidikan.....	42
4. Jabatan.....	43
C. Analisis Data Deskriptif Variabel.....	43
1. Deskriptif Variabel Transaransi Penggunaan Anggaran	43
2. Deskriptif Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	46
3. Prosedur Penyajian Instrument Penelitian	51
a. Uji Validitas	51
b. Uji Reliabilitas	52
c. Uji Analisis Regresi Sederhana.....	53
d. Uji Hipotesis.....	54
e. Uji t.....	55
f. Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Operasional Variabel	28
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	41
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 4.4 karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	43
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Transparansi Penggunaan Anggaran	44
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Daerah.	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel (X).....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel (Y).....	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Sederhana	54
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	55
Tabel 4.12 Hasil Uji t.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah dikenal dengan konsep pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur penyusunan laporan pertanggungjawaban. Transparansi penyusunan anggaran masih minim karena hanya melibatkan pihak DPRD. Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala daerah dibahas dengan DPRD, walaupun tidak dibuka secara luas kepada publik. Pengukuran kinerja baru sebatas target ukuran perbandingan anggaran dengan realisasinya (penyerapan anggaran), perbandingan antara standar biaya dan realisasinya (efisiensi anggaran, target dan persentase fisik proyek). Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah biasa dikatakan belum melihat bahwa akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian yang penting dalam pengelolaan. Namun demikian, hal itu biasa dikaitkan dengan pengelolaan laporan keuangan negara yang sangat sentralistik dimana porsi alokasi anggaran negara untuk pemerintah daerah sangat minim dan relatif (Djalil 2014:14).

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang biasa kepada pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep keterandalan (*reliability*) dimana informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (Adha : 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu.

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan khususnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penerapan SAP membawa konsekuensi juga pada perubahan sistem akuntansi. Sistem akuntansi memang tidak diatur dalam SAP tetapi harus merancang sistem akuntansinya sendiri yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP. Perubahan-perubahan yang ada pada sistem akuntansi itu secara wajar berpengaruh pada undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas publik. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah.

Menurut penelitian terdahulu Salomi j. Hahennusa, (2015) dengan judul “ pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota ambon” dengan menggunakan metode kuantitatif maka hasil penelitian ini adalah hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara

lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga transparansi akan terwujud.

Acep suherman, dan AMIK BSI (2018) dengan judul “laporan keuangan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa”. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka hasil penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari kinerja aparat pemerintah desa yang pertanggungjawabannya selama satu periode, laporan keuangan merupakan rekam jejak singkat kinerja yang telah dilakukan. Baik buruknya manajemen akan dicerminkan dalam sebuah laporan pertanggungjawabannya. Laporan keuangan pemerintah desa merupakan alat pertanggungjawabannya kepala desa dalam satu periode kepemimpinannya, laporan pertanggungjawabannya yang kredibel dan bermakna harus bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang sama dengan desa lain atau dengan beberapa periode sebelumnya, maupun dengan anggarannya.

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang didalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku pemerintahan Kota Otonom Kota Palopo. luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km.

Dinas perdagangan kabupaten berdiri pada bulan januari 2017 yang dimana sebelum berdirinya dinas perdagangan kab. Luwu nama awal dari dinas perdagangan adalah koperindag yang dipisahkan secara sah pada tahun 2017 menjadi dinas perdagangan kab. Luwu sebagai induk koperindag dibagi atas dua yaitu koperasi dan dinas perdagangan kab. Luwu.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUWU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu : Apakah Transparansi Penggunaan Anggaran Berpengaruh Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkapan referensi mengenai pengaruh transparansi penggunaan anggaran terhadap penyajian laporan keuangan daerah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan laporan keuangan daerah terutama pada lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai wahana untuk latihan dan studi banding antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya diterapkan dalam Pemerintah Daerah, sehingga dapat dijadikan bekal untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terutama mengenai “Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu”

b. Bagi pihak satuan kerja perangkat daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermaksud bermanfaat bagi pegawai yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan daerah lebih mengerti dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Transparansi Anggaran.

c. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan Keuangan Daerah

1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang tersruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas

pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, beberapa laporan keuangan yang bertujuan umum terdiri dari :

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. Masing-masing Kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
- d. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut SFAC NO. 4 (*Statement of Financial Accounting Concepts No 4*) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non bisnis/nirlaba (*Objectives Of Financial Reporting By Nonbusiness Organizations*) yaitu adalah:

1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat diberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai sumber daya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonsubsidi serta kemampuannya untuk melakukan dan memberi pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai

kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
6. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
7. Memberikan informasi dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerima periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, pelaporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (OP), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan

Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar

4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kelima karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya informasi yang relevan adalah: memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Tepat waktu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna.

2. Pengambilan Keputusan

Lengkap informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

3. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: Penyajian jujur informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Dapat diverifikasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda. Netralitas informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4. Dapat Bandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

5. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

B. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi. Dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgting. (Acep, 2018)

2. Manfaat Transparansi

Menurut Sri Minarti (2011) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

3. Tujuan Transparansi

Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara transparan, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan organisasi, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakannya (Kama, 2011).

4. Asas-Asas Transparansi

Menurut Fierda (2015) asas-asas transparansi meliputi keterbukaan atas informasi yang disampaikan kepada publik, pemanfaatan informasi kepada publik dan hasil yang disampaikan secara tepat waktu.

C. Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Menurut Munandar (2011), pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis atau meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

2. Tujuan-tujuan Anggaran

Berikut adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran menurut Sasongko dan Parulian (2013:3):

a. Perencanaan

Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.

b. Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.

c. Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.

d. Pengendalian

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

3. Manfaat Anggaran

Menurut Nafarin (2013:19), anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain:

- a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
- b. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
- c. Dapat memotivasi pegawai.
- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
- e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

4. Fungsi Anggaran

Menurut Nafarin (2013:5), seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi:

a. Planning (Perencanaan)

Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. Di dalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang. Termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang di butuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.

c. Actuating (Menggerakkan)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus dikerahkan,

di koordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.

d. **Controlling (Pengendalian)**

Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai.

Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efektif dan efisien.

5. Kelemahan Anggaran

Menurut Nafrin (2013:20), Anggaran di samping mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut:

- a. .Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
- b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat.
- c. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

6. Langkah-langkah Menyusun Anggaran

Penyusunan anggaran biasanya dilaksanakan oleh Komite Anggaran. Komite Anggaran tersebut anggotanya terdiri atas para manajer pelaksanaan fungsi-fungsi pokok perusahaan sesuai dengan prinsip keperansertaan. Anggaran

tersebut meliputi : manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer pengawasan dan keuangan.

Menurut Nafarin (2013:9), proses penyusunan anggaran dibagi kedalam beberapa tahapan antara lain:

a. Penentuan Pedoman Anggaran

Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran.

b. Persiapan Anggaran

Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan (sales budget) terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan (sales forecast). Dalam tahap persiapan anggaran ini, biasanya diadakan rapat atas bagian terkait saja.

c. Tahap Penentuan Anggaran

Pada tahap ini, semua manajer dan direksi mengadakan rapat meliputi kegiatan

- a) perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran.
- b) Mengoordinasikan dan menelaah komponen anggaran
- c) Pengesahan dan pendistribusian anggaran.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Anim Wiyana, Anna Sutrisna S (2016, Jurnal Syariah Paper Accounting, ISSN 2460-0784)	Determinan Aksesibilitas Dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kuantitatif	Penelitian membuktikan bahwa presentasi Regional Laporan Keuangan dan aksesibilitas baik secara parsial simultan mempengaruhi Keuangan Akuntabilitas Manajemen di Pemerintah Kota Makassar
2.	Salomi J. Hehanussa (2015, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 2 No. 1)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Da Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon	Kuantitatif	Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan control dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga Good Governance Dan Clean Government akan terwujud di pemerintahan kota Ambon.
3.	Binti Sa'adah (2015, Kebijakan Dan Manjemen Publik, Vol 3 No. 2)	Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Melalui E-GOVERNMENT	Kualitatif	Akuntabilitas dan transparansi anggaran sudah dilaksanakan dengan baik, namun proses penganggaran secara manual masih rawan terjadinya penyimpangan anggaran. Selain itu, tertutupnya proses penganggaran yang dilakukan oleh TAPD dan Banggar rawan terjadinya penyimpangan
4.	Angreini Pangummbalera ng, Dan Sherly Pinatik (2014, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Vol.2 No. 2)	Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DIPENDA dan BPKBMD kota Bitung. Diperlukan penyempurnaan dalam system informasi keuangan sehingga penyajian informasi lebih tepat, cepat, dan

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan serta perlu mensosialisasikan tujuan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
5.	Acep Suherman, AMIK BSI Sukabumi (2018, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Vol. 6)	Laporan Keuangan Sebagai Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa(2018)	Kualitatif	Laporan keuangan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari kinerja aparat pemerintahan desa yang pertanggungjawaban selama satu periode, laporan keuangan merupakan rekam jejak singkat dari kinerja yang telah dilakukan. Baik buruknya manajemen akan dicerminkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban. Laporan keuangan pemerintahan desa merupakan alat pertanggungjawaban kepala desa dalam satu periode kepemimpinannya, laporan pertanggungjawabannya yang kredibel dan bermakna harus bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang sama dengan desa lain atau dengan beberapa periode sebelumnya, maupun dengan anggarannya.

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
6.	Diana sari (2015, ISSN-2252-3936)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Deskriptif Analitik	Dari hasil penelitian, nilai koefisien determinasi sebesar 51.26%. Nilai ini menunjukkan besarnya kontribusi Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan. Dengan demikian semakin tinggi penerapan Pengendalian Internal, maka Laporan Keuangan semakin Transparan atau sebaliknya jika tidak diterapkan Pengendalian Internal maka Laporan Keuangan semakin tidak Transparan
7.	Ni Kadek Alit Apriliani, Edy Sujana, Gede Adi Yuniarta (Volume 3 No 1 Tahun 2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja	Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis, semua regresi lulus dalam uji asumsi klasik. Penelitian ini menemukan bahwa penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Perangkat Daerah Kabupaten Kalungkung		transparansi laporan keuangan daerah baik secara parsial dan simultan.
8.	Baiq Nurrizkiana, Lilik Handayani, Erna Widiastuti (2017, Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol. 18 No. 1)	Determinan Transapransi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stackholders	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan sebagian pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan daerah. Begitu pula dengan transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dari pemangku kepentingan publik.
9.	Putu Sri Wahyuni, Nil Uh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Hermawati (2014, e-Journal vol. 2 no. 1)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah daerah. Peneliti menyarankan pemerintah agar lebih meningkatkan penyajian laporan keuangannya dan mengakses ke publik agar

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				akuntabilitas laporan keuanganya dapat ditingkatkan.
10.	Wendi Adha, Vince Rahmawati, Al-Azhar (2014, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Vol. 1 No. 2)	Pengaruh akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen pimpinan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (studi empiris pada SKPD KOTA DUMAI)	Kuantitatif	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan akuntabilitas komitmen mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Dumai, sedangkan ketidakpastian lingkungan tidak mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Besarnya pengaruh akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan dan komitmen kepemimpinan terhadap implementasi lokal transparansi pelaporan keuangan pemerintah Dumai adalah 77%.

E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh transparansi penggunaan anggaran terhadap penyajian laporan keuangan daerah adalah:



Gambar 2.1

Kerangka Konsep

F. Hipotesis

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu instansi telah transparan dalam penyajian pelaporan penggunaannya atau tidak. Menurut penelitian terdahulu yakni Anim(2016) dan Adha (2014) bahwa penyajian laporan keuangan pada suatu daerah berpengaruh pada transparansi penggunaan anggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Diduga bahwa Transparansi Penggunaan Anggaran Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksplanatori. Menurut Sugiyono (2012:21) penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel independen transparansi penggunaan anggaran (X) dengan variabel dependen penyajian laporan keuangan daerah (Y). Sedangkan karakteristik penelitian ini bersifat replikasi, sehingga hasil uji hipotesis harus didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang diulang dengan kondisi lain yang kurang lebih sama. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui apakah transparansi penggunaan anggaran dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Jln Sabe, Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Waktu dilakukannya penelitian selama 10 hari yakni mulai pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 20 Juni 2019.

C. Defenisi Oprasional Variabel dan Pengukuran

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata

dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*).

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). (Sugiyono,2012:39). Dalam penelitian ini adalah transparansi penggunaan anggaran.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*).

Menurut Sugyono (2012,39) variabel dependent sering disebut variabel output, criteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah penyajian laporan keuangan daerah.

Tabel 3.1
Operasional variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Variabel Independen			
Transparansi Anggaran (X)	Transparansi Adalah Kegiatan Pembangunan Yang Harus Dikelola Dengan Setransparan Mungkin Bagi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Informasi 2. Informasi Harus Diungkapkan Secara Lengkap 3. Adanya Media Untuk Menyampaikan 	Nominal

		Pendapat	
Variabel Dependen			
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (Y)	Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat dipahami 	Ordinal

D. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu sebanyak 44 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini melalui beberapa cara, yaitu:

A. Data primer diperoleh dengan cara kuesioner, dimana kuesioner adalah sejumlah pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Kuesioner tersebut kemudian didistribusikan kepada responden (pegawai) di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara mengelola data yang terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengelolaan data ini digunakan untuk menunjukkan masalah yang telah dirumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Validitas

Uji validitas menurut Umar (2011:166) berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Pengujiannya dilakukan secara statistik, yang dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dan skor total dengan menggunakan metode *product moment pearson correlation*.

Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas:

- a. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut valid pada signifikansi 0,05 (5%).
- b. Jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Umar (2011:168) berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuisioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *cronbach's alpha* (α), dimana suatu instrumen dapat dinyatakan handal (*reliable*) bila $\alpha > 0,60$.

3. Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini adalah transparansi penggunaan anggaran terhadap penyajian laporan keuangan daerah maka model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi sederhana yang hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

Y = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X = Transparansi Penggunaan Anggaran

α = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

β = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = Error

4. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau ketrikatan antara variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (Uji t) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh audit internal sebagai variabel independen mewujudkan laporan keuangan daerah sebagai variabel dependen.

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$ maka H1 diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$ maka H1 ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

Kabupaten Luwu berada pada titik koordinat 2°3'45" sampai 3°37'30" Lintang Selatan dan 119°15" sampai 121°43'11" BB. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Kabupaten yang berada pada bagian utara Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 8 kabupaten, yaitu sebelah utara berbatasan dengan kabupaten luwu utara dan kabupaten tana toraja. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten sidrap dan kabupaten wajo. Di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten tana toraja dan enrekang dan di sebelah timur berbatasan dengan teluk bone dan Sulawesi Tenggara.

Luas wilayah kabupaten luwu adalah 3.000.25 km² dari luas wilayah Sulawesi selatan. Wilayah kabupaten luwu terdiri dari 22 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 221.

Dinas Perdagangan Kab. Luwu berdiri pada bulan Januari 2017 yang dimana sebelum berdirinya Dinas Perdagangan nama awal dari Dinas perdagangan adalah KOPERINDAG yang dipisahkan secara sah pada tahun 2017 menjadi Dinas Perdagangan. Sebagai induk KOPERINDAG dibagi atas 2

yaitu Koperasi (UMKM) dan Dinas Perdagangan yang menjadi kantor baru di Kabupaten Luwu.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

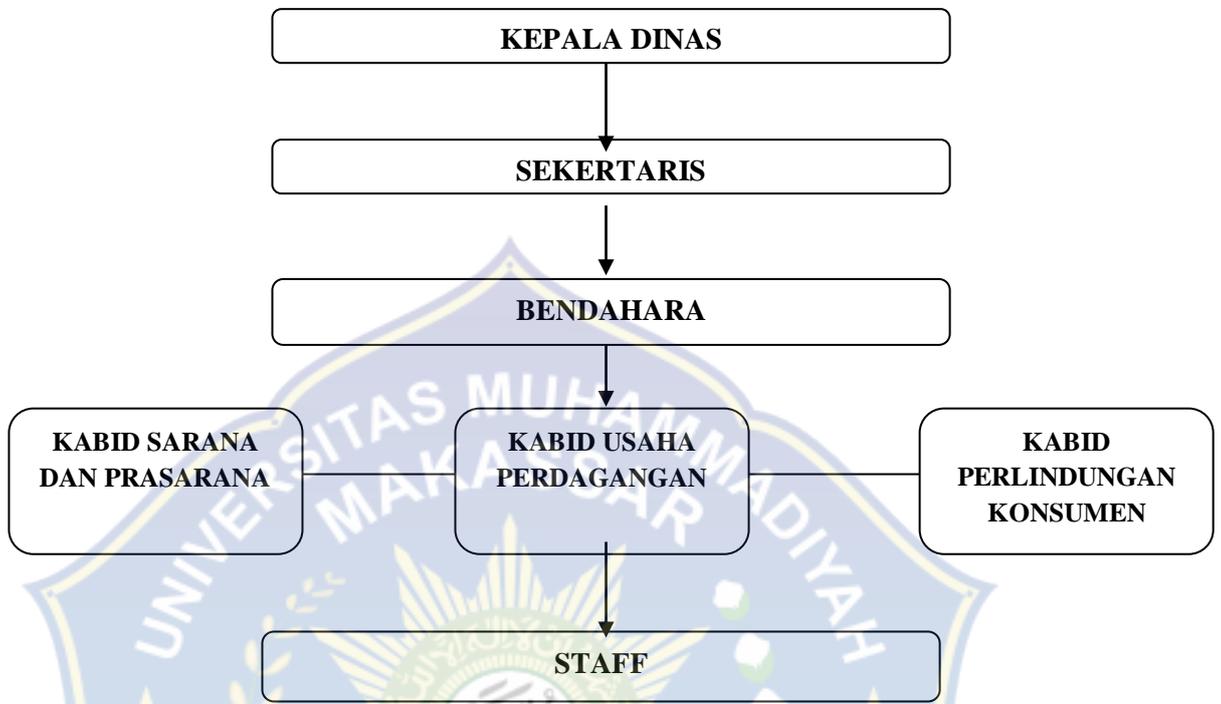
Terdepan Penggerak Perekonomian Menuju Kesejahteraan Masyarakat Luwu.

b. Misi

- 1) Peningkatan Efisiensi Distribusi Dan Peningkatan Sarana Perdagangan.
- 2) Peningkatan Pelayanan Standarisasi Kemetrolgian Dan Perlindungan Terhadap Konsumen.
- 3) Mewujudkan Tertib Usaha Dan Peningkatan Konsumsi Produk Dalam Negeri.



3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

4. Deskripsi Pekerjaan/ Job Discription

1. Kepala Dinas

Kepala dinas perdagangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan. Fungsi dari Kepala Dinas yakni :

1. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perdagangan
2. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, bidang dan fungsinya dalam rangka kelancara pelaksanaan tugas.

2. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Sekretaris memiliki fungsi yaitu:

1. Penyusunan rancangan kebijakan dinas
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang UPTD.
3. Menyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas
4. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.
5. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan.
6. Pelaksanaan analisis jabatan dan baban kerja
7. Pengkoordinasian penyusunan standar operasi prosedur (SOP) kegiatan dinas
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bendahara

Mengurus keuangan dinas dan gaji para pegawai. Bendahara memiliki fungsi yaitu :

1. Menyusun rencana operasional program kerja sub sebagai keuangan dan kepegawaian
2. Mengendalikan rencana tahunan
3. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan
4. Mengumpul dan mengelola data laporan hasil kegiatan
5. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, dan penyajian data statistik
6. Mambuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian
7. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penausaha keuangan daerah
8. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum
9. Melaksanakan kebendaharaan keuangan
10. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas
11. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala organisasi perangkat daerah) yang ditetapkan sebagai penggunaan anggaran dengan keputusan bupati
12. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi

13. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran

14. Melaksanakan kegiatann meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat

15. Pertanggung jawab (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulan

16. Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan LP2P/LHKPN/LHKASN

4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Mengarahkan para staf untuk menyediakan segala keperluan pasar.

Yang dimana fungsinya yaitu :

1. Menyusun program kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasarana

2. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan menggunakan produk dalam negeri

3. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan evaluasi terhadap alur distribusi, stok, pemantauan harga kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya

4. Menyediakan segala kepentingan yang dibutuhkan oleh pasar dan pelaku usaha

5. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen

Mengarahkan setiap staf untuk mengadakan sidak untuk melindungi terjadinya kerugian bagi para konsumen dan pelaku usaha. Yang dimana fungsinya yaitu :

1. Menghimpun kebijakan teknis dibidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 2. Menghimpun data produk barang dan jasa yang beredar serta data kemetrolgian sesuai jenisnya untuk mengetahui peredaran dan pengembangan
 3. Mengalisa data produk barang dan jasa serta kemetrolgian untuk mengetahui kualitasnya
 4. Menyusun rencana kegiatan dibidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian berdasarkan kebutuhan program unit
 5. Melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa serta kemetrolgian secara berkala dan terpadu untuk tertibnya usaha perdagangan dan perlindungan konsumen
 6. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyelesaian sengketa konsumen untum mencari solusi penyelesaian sengketa konsumen
 7. Melaksanakan pembinaan teknis kepada pelaku usaha perdagangan untuk tertibnya peredaran barang/jasa serta penggunaan alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP)
 8. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk
6. Kepala Bidang Usaha Perdagangan
- Mengarahkan para staf untuk menginput usaha-usaha yang bersifat legal/sah. Yang dimana fungsinya yaitu:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pengembangan usaha
2. Mengelola dan menganalisa data usaha
3. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan
4. Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya agen/distributor, perdagangan besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya
5. Member dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka operasi bahan pokok dan barang strategis lainnya
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
7. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
8. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas
9. Menilai prestasi staf sebagai bahan pembinaan dan pembangunan karir

B. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 44 responden yang berhubungan dengan tiap-tiap variabel yang di teliti. Berikut ini akan dideskripsikan identitas responden meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dan jabatan. Pengungkapan identitas responden semata dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai karakteristik responden yang setempat terjaring dalam penelitian ini.

1. Jenis kelamin

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	19	43,2%
2	Wanita	25	56,8%
Total		44	100%

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu untuk jenis kelamin laki- laki yaitu sebanyak 19 pegawai dari 44 responden atau 43.2%, sementara untuk jenis kelamin wanita sebanyak 25 pegawai atau 56.8% dari total responden.

2. Umur

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	13	29.55%
2	31-40	18	40.90%
3	>50	13	29.55%
Total		44	100%

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Karakter usia responden di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu yang berusia 20-30 tahun

yaitu sebanyak 13 pegawai dari 44 responden atau 29.55%, responden umur 31-40 tahun sebanyak 18 pegawai atau 40.90%, dan responden umur >50 sebanyak 13 pegawai atau 29.55%. Komposisi tersebut memberikan gambaran bahwa dari karakteristik umur, sampel- sampel penelitian cukup mewakili populasi.

3. Pendidikan

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	6	13.64%
2	DIII	5	11.36%
3	S1	29	65.91%
4	S2	4	9.09%
	Total	44	100%

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Karakter pendidikan responden di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu dengan pendidikan terakhir SLTA sebanyak 6 pegawai atau 13.64%, responden dengan pendidikan terakhir DIII sebanyak 5 pegawai atau 11.36%, responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 29 pegawai atau 65.91%, dan responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 4 pegawai atau 9.09%. Komposisi tersebut memberikan gambaran bahwa dari karakteristik umur, sampel- sampel penelitian cukup mewakili populasi.

4. Jabatan

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Dinas	1	2.27%
2	Bidang Sekretariat	7	15.91%
3	Bidang Keuangan	15	34.09%
4	Bidang Retribusi	15	34.09%
5	Usaha Perdagangan	6	13.64%
	Jumlah	44	100%

C. Analisis Data Deskriptif Variabel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 44 responden melalui penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada lampiran.

1. Deskripsi Variabel Transparansi Penggunaan Anggaran

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi. Dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgting. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara trnsparan, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah

dilakukan organisasi, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakannya.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis atau meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Tabel 4.5

Tanggapan Responden Mengenai Transparansi Penggunaan Anggaran

NO	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Y.1	12	19	8	2	3	44
2	Y.2	20	13	9	1	1	44
3	Y.3	11	11	17	4	1	44
4	Y.4	14	19	10	-	1	44
5	Y.5	11	17	13	1	2	44
6	Y.6	11	7	21	3	2	44
7	Y.7	8	16	14	6	-	44
8	Y.8	12	18	11	1	2	44
9	Y.9	10	14	14	6	-	44
10	Y.10	8	20	14	2	-	44

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap pernyataan Y.1 bahwa, Informasi yang disajikan sesuai dengan fakta dan analisis keputusan-keputusan yang telah diambil, Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 12 responden, Setuju (S) sebanyak 19 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 8 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 2 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 3 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan Y.2 bahwa, Menyediakan informasi tentang tanggung jawab penggunaan biaya-biaya. Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 20 responden, Setuju (S) sebanyak 13 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 9 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 1 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan Y.3 bahwa, Informasi yang disajikan oleh pemerintah akurat. Berdasarkan pernyataan tersebut, responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 11 responden, Setuju (S) sebanyak 11 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 17 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 4 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 1 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan Y.4 bahwa, Terdapat akurasi kelengkapan informasi berhubungan dengan penyusunan laporan penggunaan anggaran, Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 14 responden, Setuju (S)

sebanyak 19 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 10 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 1 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan Y.5 bahwa Laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya harus disajikan, Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 11 responden, Setuju (S) sebanyak 17 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 13 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 2 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan Y.6 bahwa Laporan pertanggung jawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu, Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 11 responden, Setuju (S) sebanyak 7 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 21 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 2 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan Y.7 bahwa Laporan keuangan dan laporan hasil audit BPK dipublikasikan di website resmi pemerintahan daerah, Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 8 responden, Setuju (S) sebanyak 16 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 14 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 6 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 0 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan Y.8 bahwa Laporan keuangan SKPD diriview oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK, Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 12 responden, Setuju (S) sebanyak 18 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 11 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 2 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan Y.9 bahwa, Pengumuman penggunaan anggaran mudah didapatkan oleh publik,. Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 10 responden, Setuju (S) sebanyak 14 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 14 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 6 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 0 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan Y.10 bahwa Terdapat media untuk masyarakat dapat menyalurkan kritik dan saran kepada pemerintahan, Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 8 responden, Setuju (S) sebanyak 20 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 14 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 2 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 0 responden.

2. Deskriptif Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkapkan secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat di pertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi penyajian laporan keuangan. Berikut ini distribusi frekuensi 10 jawaban variabel atas penyajian laporn keuangan daerah yaitu pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Tanggapan Responden Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Daerah

NO	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	X.1	6	10	21	5	2	44
2	X.2	11	19	7	4	3	44
3	X.3	7	21	14	2	-	44
4	X.4	15	14	13	1	-1	44
5	X.5	3	19	16	6	-	44
6	X.6	9	20	8	4	3	44
7	X.7	18	4	15	7	-	44
8	X.8	9	19	9	4	3	44

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan tabel diatas, dimana pernyataan X.1 Data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap, Berdasarkan pernyataan tersebut, responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 6

responden, setuju (S) sebanyak 10 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 21 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 5 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 2 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan X.2 bahwa Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih lanjut, Berdasarkan pernyataan tersebut, responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 11 responden, Setuju (S) sebanyak 19 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 7 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 4 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 3 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan X.3 bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah, apabila dilakukan pengujian atau verifikasi hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang diterbitkan, Berdasarkan pernyataan tersebut, responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 7 responden, Setuju (S) sebanyak 21 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 14 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 2 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 0 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan X.4 bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan diterbitkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu, Berdasarkan pernyataan tersebut, responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 15 responden, Setuju (S) sebanyak 14 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 13 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 1

responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 1 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan X.5 bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan instansi yang sejenis, Berdasarkan pernyataan tersebut, responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 3 responden, Setuju (S) sebanyak 19 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 16 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 6 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 0 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan X.6 bahwa Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 9 responden, Setuju (S) sebanyak 20 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 8 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 4 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 3 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan X.7 bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan menyajikan informasi secara jelas dan dapat dipahami oleh pengguna, Berdasarkan pernyataan tersebut, responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 18 responden, Setuju (S) sebanyak 4 responden, jawaban Ragu-Ragu (RR) sebanyak 15 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 7 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 0 responden.

Tanggapan responden terhadap pernyataan X.8 bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang

disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, Berdasarkan pernyataan tersebut, responden menjawab Sangat Setuju (SS) yakni sebanyak 9 responden, Setuju (S) sebanyak 19 responden, jawaban Ragur-Ragu (RR) sebanyak 9 responden, jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 4 responden, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 3 responden.

3. Prosedur Pengujian Instrument Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ketepatan alat ukur tentang isi atau arti yang sebenarnya yang diukur, dengan kata lain uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Pengujian validitas menggunakan bantuan SPSS 20.0 Adapun kriteria penilaian uji validitas, adalah:

- 1) Apabila r hitung $>$ r tabel (pada taraf signifikansi 5%) maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
- 2) Apabila r hitung $<$ r tabel (pada taraf signifikansi 5%) maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Transparansi Penggunaan Anggaran (X)

No	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	Y.1	0,719	0,297	Valid
2	Y.2	0,744	0,297	Valid
3	Y.3	0,638	0,297	Valid
4	Y.4	0,756	0,297	Valid
5	Y.5	0,766	0,297	Valid

6	Y.6	0,802	0,297	Valid
7	Y.7	0,637	0,297	Valid
8	Y.8	0,829	0,297	Valid
9	Y.9	0,700	0,297	Valid
10	Y.10	0,710	0,297	Valid

Sumber: Hasil Olah Data 2019

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah (Y)

No	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	X.1	0,704	0,297	Valid
2	X.2	0,850	0,297	Valid
3	X.3	0,633	0,297	Valid
4	X.4	0,621	0,297	Valid
5	X.5	0,605	0,297	Valid
6	X.6	0,816	0,297	Valid
7	X.7	0,572	0,297	Valid
8	X.8	0,832	0,297	Valid

Sumber: Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan, dapat dilihat bahwa keseluruhan item variabel penelitian mempunyai r hitung > r tabel yaitu pada taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) dan $n = 44$ ($N = 44 - 2$) diperoleh r tabel = 0,297 maka dapat diketahui hasil tiap-tiap item > 0,297 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item variabel penelitian adalah valid untuk digunakan sebagai instrument

dalam penelitian atau pernyataan yang diajukan dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara One Shot atau sekali pengukuran saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (Ghozali, 2013:4). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,06 (Algifari 2015:97). Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel diringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Items
Transparansi Penggunaan Anggaran	0,902	10
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0,860	8

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena telah melewati batas koefisien reliabilitas (0,06) sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

c. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif.

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-.021	.924	
	TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN	.765	.024	.980

a. Dependent Variable: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
Sumber : Hasil Olah Data 2019

Dari tabel diatas, adapun persamaan regresinya:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$Y = -0,021 + 0,255 (\text{transparansi penggunaan anggran}) + e$$

- a. Nilai konstanta dari persamaan diatas sebesar 0,021 artinya apabila variabel Transparansi Penggunaan Anggaran = 0 maka pengaruhnya terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah adalah sebesar 0,765.
- b. (X) Trasparansi Penggunaan Anggaran menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,765 (Transparansi Penggunaan Anggaran). Hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan pada variabel Tansparansi Penggunaan Anggaran sebesar 1% maka Penyajian Laporan Keuangan Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,765%

d. Pengujian Hipotesis

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:95).

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980 ^a	.960	.959	1.140

a. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan tabel besarnya nilai koefisien R Square adalah 0,960, hal ini berarti 96,0% variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah sedangkan sisanya ($100\% - 96,0\% = 4,00\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

e. Uji t

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah

responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$ maka H1 diterima
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$ maka H1 ditolak

Tabel 4.12

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.021	.924	-.023	.982
	TRANSPARANSI PENGUNAAN ANGGARAN	.765	.024	.980	31.730 .000

a. Dependent Variable: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan hasil dari olah data diatas maka pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Penyajian Laporan keuangan daerah sebesar 0,765 dengan signifikansi 0.000. hal ini artinya nilai signifikannya jauh lebih kecil dari 0.05 dan menunjukkan bahwa Transparansi Penggunaan Anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan arah koefisien regresi positif, sehingga dengan demikian hasil pengujian untuk hipotesis tersebut diterima. Artinya Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Transparansi Penggunaan Anggaran.

f. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka akan dilakukan pembahasan yang memberikan beberapa informasi secara rinci tentang hasil penelitian serta bagaimana pengaruh variabel terhadap variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Transparansi Penggunaan Anggaran (X), sedangkan variabel dependennya adalah Penyajian Laporan Keuangan daerah (Y). pengujian hipotesis antar variabel independen dan dependen dilakukan melalui hasil analisis SPSS 20. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian pada persamaan ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. Karena nilai signifikannya jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Penyajian Laporan Keuangan Daerah atau dapat dikatakan bahwa variabel Transparansi Penggunaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. Guna mewujudkan praktik pengelolaan penggunaan anggaran yang relevan, andal, akurat, dan dapat dipercaya, dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna

dalam menilai akuntabilitas dan transparansi dan membuat keputusan baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

Penyajian laporan keuangan daerah sangat berperan penting terhadap transparansi penggunaan anggaran, dimana komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi acuan dalam penggunaan anggaran dalam pemerintahan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salomi J (2015) pada Kota Ambon yang menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang dapat bermanfaat untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul yaitu mengenai Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.:

1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi penggunaan anggaran pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
2. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh aparatur.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel independen yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan daerah oleh karena itu diharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan daerah.
2. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya tidak berfokus pada satu instansi saja seperti dalam penelitian ini, namun diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada beberapa instansi agar dapat menggambarkan secara umum dan luas mengenai pengaruh transparansi penggunaan anggaran terhadap penyajian laporan keuangan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adha,W.,Ratnawati,V.,& Al-azhar, A. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Skpd Kota Dumai)*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1-15.
- Apriliani, N. K. A., Edy Sujana, S. E., Yuniarta, G. A., & AK, S. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)*. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas keuangan daerah: implementasi pasca reformasi*. *RMBooks*.
- Hehanussa, S. J. (2015, May). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. In *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 2, No. 1, pp. 82-90).
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*
- Indria, N. A. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya* (Bachelor's thesis, Fak. Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta).
- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2007. *UndangUndang Republik Indonesia No. 40 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). *Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders*. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1), 28-47.
- Pangumbalerang, A., & Pinatik, S. (2014). *Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sa'adah, B. (2015). *Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar)*. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 1-10.

Sari, D. (2012). *Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah*.

Shafratunnisa, F. (2015). *Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir*.

Suherman, A. (2018). *Laporan Keuangan Sebagai Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(12), 128-138.

Wahyuni, P. S., Sulindawati, N. L. G. E., Herawati, N. T., & AK, S. (2014). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung)*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).

Wiyana, A., & Sutrisna, S. (2016). *Determinan Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.



LAMPIRAN

KUESIONER

Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

Kepada Yth :

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari agar sudi kiranya memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya. Dan saya menjamin serta bertanggung jawab atas informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan adalah untuk kepentingan akademis semata.

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan, saya ucapkan terima kasih.

(Tri Astuti M)

Petunjuk Pengisian :

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk masing-masing pernyataan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari cukup memberikan tanda centang pada kolom kode jawaban yang tersedia yaitu : SS, S, RR, TS, dan STS. Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 Tidak Setuju (TS)

Skor 3 Ragu-Ragu (RR)

Skor 4 Setuju (S)

Skor 5 Sangat Setuju (SS)

Identitas Responden

Nama : _____

Umur : _____

Jenis Kelamin : _____

Jabatan : _____

Pendidikan Terakhir : _____

No	Transparansi Penggunaan Anggaran	SS	S	RR	TS	STS
Menyediakan Informasi						
1	Informasi yang disajikan sesuai dengan fakta dan analisis keputusan-keputusan yang telah diambil					
2	Menyediakan informasi tentang tanggung jawab penggunaan biaya-biaya					
3	Informasi yang disajikan oleh pemerintah akurat					
Informasi Harus Diungkapkan Secara Lengkap						
4	Terdapat akurasi kelengkapan informasi berhubungan dengan penyusunan laporan penggunaan anggaran					
5	Laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya harus disajikan					

6	Laporan pertanggung jawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu					
Adanya Media Untuk Menyampaikan Pendapat						
7	Laporan keuangan dan laporan hasil audit BPK dipublikasikan di website resmi pemerintahan daerah					
8	Laporan keuangan SKPD diriview oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK					
9	Pengumuman penggunaan anggaran mudah didapatkan oleh public					
10	Terdapat media untuk masyarakat dapat menyalurkan kritik dan saran kepada pemerintahan.					

NO	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	SS	S	RR	TS	STS
Relevan						
1	Data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap			★		
2	Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih lanjut					
Andal						
3	Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah, apabila dilakukan pengujian atau verifikasi hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang diterbitkan					
4	Laporan keuangan yang dihasilkan diterbitkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu					
Dapat dibandingkan						
5	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan instansi yang sejenis					
6	Infomasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keaungan periode sebelumnya					
Dapat dipahami						
7	Laporan keuangan yang dihasilkan					

	menyajikan informasi secara jelas dan dapat dipahami oleh pengguna					
8	Laporan keuangan yang dihasilkan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					



Tabel Kuesioner Transparansi Penggunaan Anggaran (X)

RESPONDEN	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	JUMLAH
1	1	1	3	1	1	1	3	1	2	3	17
2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	25
3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	2	26
4	1	4	3	4	1	4	3	1	3	4	28
5	3	3	2	3	4	2	2	4	3	3	29
6	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
7	4	3	3	4	3	3	2	3	2	3	30
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
9	1	5	3	4	4	3	2	4	3	3	32
10	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	33
11	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	33
12	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	33
13	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	33
14	4	3	2	4	4	3	3	4	3	3	33
15	5	4	3	4	2	3	4	2	4	3	34
16	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	36
17	3	3	3	3	4	3	3	4	5	5	36
18	4	2	4	4	4	3	3	4	5	4	37
19	3	4	3	3	3	5	4	4	4	4	37
20	4	5	3	5	3	3	4	3	4	4	38
21	5	4	3	3	4	4	3	4	5	3	38
22	4	5	3	5	3	4	4	3	3	4	38
23	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	39
24	3	5	4	4	4	4	4	4	3	4	39
25	4	5	2	5	4	5	2	4	4	4	39
26	5	5	3	4	4	3	5	4	3	3	39
27	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	39
28	5	5	5	3	5	3	2	5	3	4	40
29	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	40
30	4	5	1	5	4	3	4	4	5	5	40
31	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	41
32	4	5	4	4	5	3	4	5	4	4	42
33	4	4	5	5	4	3	5	4	3	5	42
34	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	44
35	4	5	5	5	5	3	4	5	4	4	44
36	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	45
37	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	46
38	5	5	5	4	3	5	5	5	5	4	46

39	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	47
40	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	47
41	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	48
42	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	48
43	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
44	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49



Tabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (Y)

RESPONDEN	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	JUMLAH
1	1	1	3	1	3	1	3	1	14
2	2	1	3	5	2	1	2	1	17
3	1	2	2	3	3	2	3	2	18
4	2	3	2	3	2	3	2	3	20
5	4	2	3	3	3	2	3	2	22
6	3	1	4	4	4	1	4	1	22
7	4	2	4	3	3	2	3	2	23
8	2	3	3	3	3	3	3	3	23
9	2	3	3	3	3	3	3	3	23
10	2	3	3	3	3	3	3	3	23
11	3	4	3	3	2	4	2	4	25
12	3	4	4	2	2	4	2	4	25
13	3	3	5	3	3	3	3	3	26
14	4	2	4	5	4	2	4	2	27
15	3	3	4	3	4	3	4	3	27
16	3	4	3	3	3	4	3	4	27
17	3	4	3	4	3	4	3	4	28
18	3	4	3	4	3	4	3	4	28
19	3	4	3	4	3	4	3	4	28
20	3	5	4	3	2	5	2	5	29
21	4	3	4	5	4	3	4	3	30
22	5	4	4	5	2	4	2	4	30
23	4	5	4	5	3	4	2	3	30
24	3	4	4	4	4	4	4	4	31
25	4	4	4	5	3	4	3	4	31
26	3	4	4	4	4	4	4	4	31
27	3	4	4	5	4	4	4	4	32
28	4	5	3	4	3	5	3	5	32
29	3	4	4	5	4	4	4	4	32
30	3	4	4	5	4	4	4	4	32
31	3	4	4	4	4	4	5	4	32
32	3	4	4	4	5	4	5	4	33
33	5	4	4	4	4	4	4	4	33
34	3	5	3	4	4	5	4	5	33
35	4	4	4	5	4	4	4	4	33
36	3	4	5	5	4	4	4	4	33
37	4	5	5	3	4	5	4	3	33

38	3	4	5	4	5	4	5	4	34
39	5	5	4	5	3	5	3	5	35
40	3	5	3	5	4	5	5	5	35
41	4	5	4	5	4	5	4	5	36
42	5	5	5	4	5	3	4	5	36
43	5	5	5	4	4	5	4	5	37
44	5	5	5	5	4	5	4	5	38



UJI VALIDITAS TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN (X)

		Correlations										
		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	JUMLAH
X.1	Pearson Correlation	1	.454*	.393*	.506*	.559*	.490*	.404*	.591*	.417*	.363*	.719**
	Sig. (2-tailed)		.002	.008	.000	.000	.001	.007	.000	.005	.015	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X.2	Pearson Correlation	.454*	1	.396*	.675*	.527*	.633*	.413*	.563*	.364*	.425*	.744**
	Sig. (2-tailed)	.002		.008	.000	.000	.000	.005	.000	.015	.004	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X.3	Pearson Correlation	.393*	.396*	1	.368*	.447*	.483*	.426*	.494*	.244	.366*	.638**
	Sig. (2-tailed)	.008	.008		.014	.002	.001	.004	.001	.110	.015	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X.4	Pearson Correlation	.506*	.675*	.368*	1	.506*	.646*	.460*	.477*	.412*	.537*	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.014		.000	.000	.002	.001	.005	.000	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X.5	Pearson Correlation	.559*	.527*	.447*	.506*	1	.466*	.265	.922*	.497*	.452*	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000		.001	.082	.000	.001	.002	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X.6	Pearson Correlation	.490*	.633*	.483*	.646*	.466*	1	.428*	.560*	.561*	.585*	.802**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001	.000	.001		.004	.000	.000	.000	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X.7	Pearson Correlation	.404*	.413*	.426*	.460*	.265	.428*	1	.343*	.457*	.517*	.637**
	Sig. (2-tailed)	.007	.005	.004	.002	.082	.004		.023	.002	.000	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X.8	Pearson Correlation	.591*	.563*	.494*	.477*	.922*	.560*	.343*	1	.592*	.470*	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.001	.000	.000	.023		.000	.001	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X.9	Pearson Correlation	.417*	.364*	.244	.412*	.497*	.561*	.457*	.592*	1	.595*	.700**
	Sig. (2-tailed)	.005	.015	.110	.005	.001	.000	.002	.000	.000	.000	.000

	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X.10	Pearson Correlation	.363*	.425*	.366*	.537*	.452*	.585*	.517*	.470*	.595*	1	.710**
	Sig. (2-tailed)	.015	.004	.015	.000	.002	.000	.000	.001	.000		.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
JUMLAH	Pearson Correlation	.719*	.744*	.638*	.756*	.776*	.802*	.637*	.829*	.700*	.710*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Y)

		Correlations									
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	JUMLAH	
		H									
Y.1	Pearson Correlation	1	.520*	.602**	.498**	.266	.449**	.170	.475**	.704**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.081	.002	.271	.001	.000	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
Y.2	Pearson Correlation	.520**	1	.355*	.354*	.237	.957**	.199	.932**	.850**	
	Sig. (2-tailed)	.000		.018	.018	.121	.000	.195	.000	.000	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
Y.3	Pearson Correlation	.602**	.355*	1	.313*	.536**	.292	.435**	.284	.633**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.018		.038	.000	.055	.003	.061	.000	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
Y.4	Pearson Correlation	.498**	.354*	.313*	1	.359*	.338*	.336*	.357*	.621**	
	Sig. (2-tailed)	.001	.018	.038		.017	.025	.026	.017	.000	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
Y.5	Pearson Correlation	.266	.237	.536**	.359*	1	.175	.937**	.236	.605**	
	Sig. (2-tailed)	.081	.121	.000	.017		.256	.000	.123	.000	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
Y.6	Pearson Correlation	.449**	.957*	.292	.338*	.175	1	.211	.917**	.816**	
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.055	.025	.256		.168	.000	.000	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
Y.7	Pearson Correlation	.170	.199	.435**	.336*	.937**	.211	1	.245	.572**	

Y.8	Sig. (2-tailed)	.271	.195	.003	.026	.000	.168		.109	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	Pearson Correlation	.475**	.932*	.284	.357*	.236	.917**	.245	1	.832**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.061	.017	.123	.000	.109		.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	Pearson Correlation	.704**	.850*	.633**	.621**	.605**	.816**	.572**	.832**	1
JUMLAH	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



UJI RELIABILITAS TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN (X)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	44	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.902	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X.1	33.89	41.731	.631	.894
X.2	33.55	42.486	.673	.891
X.3	34.07	43.553	.540	.900
X.4	33.66	43.253	.696	.890
X.5	33.91	41.759	.711	.889
X.6	34.18	40.617	.737	.887
X.7	34.09	44.224	.548	.899
X.8	33.84	40.974	.776	.884
X.9	34.05	43.021	.618	.895
X.10	33.91	44.457	.648	.894

UJI RELIABILITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	44	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.860	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	25.50	24.767	.595	.844
Y.2	25.09	21.992	.775	.821
Y.3	25.05	26.742	.538	.851
Y.4	24.86	25.841	.496	.855
Y.5	25.36	26.795	.500	.854
Y.6	25.16	22.649	.729	.827
Y.7	25.36	26.841	.453	.859
Y.8	25.18	22.431	.751	.824

UJI REGRESI SEDERHANA

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TRANSPARAN SI PENGGUNAAN ANGGARAN ^b		Enter

a. Dependent Variable: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980 ^a	.960	.959	1.140

a. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1308.571	1	1308.571	1006.818	.000 ^b
	Residual	54.588	42	1.300		
	Total	1363.159	43			

a. Dependent Variable: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

b. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.021	.924		-.023	.982
	TRANSPARANSI PENGUNAAN ANGGARAN	.765	.024	.980	31.730	.000

a. Dependent Variable: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH



BIOGRAFI PENULIS



TRI ASTUTI MUSTAMIN, lahir di Seppong pada tanggal 23 Maret 1997 anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah Mustamin Bin Singka dan Ibu Darma Binti Dahlan. Mengenal dunia pendidikan pada tahun 2004 di SDN 36 Seppong dan tamat pada Tahun 2009, dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Belopa dan tamat tahun 2012, dan melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Belopa dan tamat pada Tahun 2015. Pada tahun yang sama (2015) penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sejak 2015 sampai sekarang.

